



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 127/DJU/HM02.3/1/2021
Lampiran : -
Hal : Pendaftaran atau Perubahan Data E-Sign
Pada Aplikasi E-Court

Jakarta, 21 Januari 2021

Yth. 1. Panitera Pengadilan Tinggi
2. Panitera Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Terkait penerapan tanda tangan elektronik (*e-sign*) pada Salinan putusan, dengan ini diinformasikan kepada seluruh Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa bagi tenaga teknis pengadilan yang dipromosikan menjadi Panitera atau bagi Panitera yang dimutasikan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri lain dalam jabatan yang sama, agar segera mengusulkan permintaan untuk mendapatkan tanda tangan elektronik atau untuk memperbaharui tanda tangan elektroniknya dengan jabatan sebagai Panitera di satker yang baru.

Usul permintaan baru atau perubahan untuk tanda tangan elektronik ditujukan langsung kepada **Biro Hukum dan Humas c.q. Bagian Pengembangan Sistem Informatika** dengan menyertakan data – data pada surat yaitu :

1. Nama Lengkap
2. NIK
3. Jabatan Saat Ini
4. Satuan Kerja Saat Ini
5. Nomor HP
6. Email Domain Mahkamah Agung

Setelah mengirimkan surat usulan pastikan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sudah diperbarui dengan ketentuan sebagai berikut :

- File Scan KTP harus berformat jpg (tidak boleh pdf) dan Scan KTP harus berwarna dengan ukuran file harus di bawah 1 MB.
- Email pada Aplikasi SIKEP harus menggunakan domain @mahkamahagung.go.id

Untuk Pengadilan Negeri, hasil scan surat usulan yang disatukan dengan lampiran data pendukung juga dapat disampaikan (diupload) melalui Aplikasi e-Court pada menu Permohonan Sertifikat TTE dengan Login menggunakan User Panitera ataupun Panitera Muda.

Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi hasil scan surat usulan dapat disampaikan ke alamat email humas.psi18@gmail.com dengan melampirkan data pendukung yang disyaratkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**
PRIM HARYADI

Tembusan :

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.